

OPINI



Tontonan Kebiadaban

Lagi-lagi rasa keamanan warga negara terganggu. Aksi premanisme yang baru saja terjadi di rumah duka Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Kamis dini hari (23/2) sangat mengecewakan. Aksi yang menewaskan dua orang tersebut adalah bentuk tindakan biadab dan barbar yang sama sekali tidak menghormati sistem bernegara.

Aksi yang dilakukan di lingkungan rumah sakit yang menjadi langgan tempat tes kesehatan untuk calon presiden, wakil presiden, menteri, serta pejabat tinggi negara lainnya itu juga menggambarkan bahwa para preman itu sudah tidak lagi memedulikan simbol-simbol negara. Apalagi aksi barbar tersebut dilakukan di wilayah yang masih terhitung masuk "ring 1" karena masih dekat dengan Istana Negara. Bahkan beberapa markas angkatan bersenjata ada di wilayah tersebut.

Aksi premanisme ini merupakan pukulan telak bagi kebanggaan pemerintah yang selalu berkata sekuat tenaga menjaga keamanan dan akan membasmikan berbagai bentuk anarkisme. Padahal salah satu tujuan bernegara seperti tertulis dalam buku teras yang karangan Thomas Hobbes *Leviathan* (1651) adalah untuk melindungi warga negara dari sifat kebinatangan warga negara lainnya (*homo homini lupus*). Berkaca dari konsep yang banyak diadaptasi ini, termasuk oleh Indonesia, ternyata pemerintah masih gagal untuk menyediakan hal yang paling dasar itu. Kebrutalan preman masuk ke alam bawah sadar warga negara dan menciptakan kegusaran.

Sebelum preman makin kuat, pemerintah harus bergerak cepat. Masyarakat sudah muak dengan berbagai cerita yang menjadi rahasia umum mengenai bagaimana para preman ini menjadi peliharaan oknum-oknum pejabat untuk melakukan berbagai pekerjaan kotor. Patut diingat, memelihara preman ini sama saja dengan memelihara anak macan karena suatu saat dia akan menggigit balik tuannya. Atau ketika tuannya lengah, dia akan memangsa siapa saja yang bisa memuaskan hasrat barubarnya.

Jangan sampai kota-kota di Indonesia mengalami nasib seperti Chicago pada 1920-an saat mafia sangat berkuasa, bahkan sanggup membuat takut pemerintah negara bagian, kepolisian, dan penegak hukum lainnya. Bahkan Chicago sempat dijuluki *lawless city* karena begitu berkuasanya para mafia dengan salah satu bosnya yang paling terkenal: Al Capone. Mafia tak lain adalah bentuk preman yang lebih terorganisasi dengan sistem yang lebih kompleks. Mereka bahkan punya aturan nilai dan sistemnya sendiri karena nyaris tidak tersentuh oleh hukum (*untouchable*).

Pengalaman di negara lain sudah ada. Pelajaran bisa diambil kalau memang niat baik itu ada pada pemerintah. Sebelum terlambat, pemerintah harus bertindak lebih keras terhadap para preman ini. Jangan tunggu para preman menjadi lebih kuat dan lebih terorganisasi sehingga bisa membuat takut jangankan warga negara biasa, aparat keamanan sekalipun *keker*.

Selain pemerintah, kalangan bisnis juga harus mendukung usaha memberantas premanisme. Pemanfaatan jasa preman di kalangan bisnis juga sudah menjadi rahasia umum. Dalam bentuk paling sederhana para preman ini menjadi tukang tagih dalam bisnis. Kadang kala para preman juga dibayar untuk menjaga tanah dan kepentingan bisnis lainnya. Pilihan para pebisnis ini menjadi tamparan juga bagi aparat keamanan bahwa masyarakat dan kalangan bisnis belum sepenuhnya percaya bahwa aparat keamanan bisa menjaga harta, benda, serta nyawa warga negara.

Oleh karena itu, hukuman sangat berat harus selalu dijatuhkan bagi para preman ini. Penegak hukum harus disadarkan untuk tak memberi ruang gerak sama sekali bagi perkembangan preman. Kalau perlu para pihak yang menggunakan jasa preman, alih-alih jasa polisi, dihukum juga. Maka, sebagaimana diungkapkan dalam adagium paling sederhana dari ilmu ekonomi, di mana ada permintaan di situ ada suplai. Ketika akhirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa beradab sudah tidak lagi menoleransi kebiadaban preman, mereka dengan sendirinya akan berkurang. ●

Paradigma Baru Pembangunan



VISHNU JUWONO

Kandidat Doktor untuk Bidang Sejarah Internasional di London School of Economics and Political Science (LSE), London, Inggris. Penulis dapat dihubungi di v.juwono@lse.ac.uk.

Ada dua peristiwa menarik pada awal Februari 2012 di London, Inggris yang membuat penulis merasa beruntung karena dapat menimba pengetahuan dari dua tokoh nasional yang dikenal dengan kepakarannya di bidang ekonomi dan tentu saja kiprahnya dalam forum internasional serta organisasi internasional. Pertama adalah kuliah umum oleh Sri Mulyani Indrawati di London School of Economics (LSE), Inggris dalam kapasitasnya sebagai direktur pelaksana Bank Dunia pada 7 Februari 2012.

Sedangkan kesempatan lain, penulis dengan bantuan KBRI London mendapatkan waktu berdiskusi dengan Prof Emil Salim, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Beliau hadir dengan kapasitasnya sebagai pemenang *Blue Planet Awards* yang diberikan oleh The Asahi Glass Foundation pada 8 Februari 2012.

Dari kuliah umum Sri Mulyani dan diskusi dengan Prof Emil Salim, keduanya beranggapan bahwa terjadi pergeseran paradigma baru dalam pembangunan ekonomi. Kedua tokoh ini beranggapan bahwa pembangunan ekonomi sudah tidak bisa lagi hanya berorientasi terhadap indikator makroekonomi dan keuangan seperti pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), tingkat inflasi, dan stabilitas kurs mata uang. Pendekatan pembangunan saat ini lebih bersifat multidimensional: pertumbuhan ekonomi dibarengi dengan distribusi pendapatan yang lebih merata; pengendalian tingkat inflasi dibarengi dengan pengurangan tingkat kemiskinan; penerapan kebijakan anggaran yang sehat—misalnya dengan pengurangan subsidi bahan bakar—diikuti dengan penyaluran bantuan darurat terhadap golongan masyarakat miskin yang terkena dampak besar dari kebijakan ini.

Kedua tokoh tersebut juga menekankan bahwa dinamika global politik yang berubah juga membuat pemerintah tidak bisa menjadi aktor tunggal dalam formulasi serta eksekusi dari kebijakan pembangunan ekonomi. Fenomena *Arab Spring* menunjukkan bahwa masyarakat sipil dengan memanfaatkan teknologi komunikasi terbaru di antaranya *social media* lebih terberdayakan sehingga dapat secara terorganisasi dan berkala menuntut pertanggungjawaban dari rejim pemerintah dalam suatu negara. Pemerintah harus memosisikan diri sebagai mitra dengan kelompok masyarakat sipil, parlemen, serta badan audit negara untuk menjalankan program pembangunan ekonomi.



SINDO/ARY PROSECTO

Seperti yang disampaikan Prof Emil Salim, masalah paling utama dalam perwujudan pembangunan berkelanjutan dalam skala global adalah ada ego sektoral pada organisasi internasional. Padahal seharusnya mereka berperan besar untuk mengkoordinasi serta mengimplementasikan sumber daya baik finansial maupun nonfinansial terutama dari negara-negara maju. Dana Moneter Internasional (IMF) terlalu fokus pada stabilitas moneter dan finansial, Bank Dunia sibuk dengan usaha akselerasi

pertumbuhan ekonomi, Persekitaran Bangsa-Bangsa (PBB) juga mengalami kesulitan memobilisasi badan-badan terkait dengan pembangunan ekonomi dan sosial yang berada di bawah koordinasinya. Akibat pengotakan pekerjaan ini, perwujudan pembangunan berkelanjutan pada tingkat global masih menghadapi tantangan yang berat.

Konteks Indonesia

Sudah menjadi rahasia umum bahwa koordinasi pada unit-unit kerja pemerintah merupakan tantangan yang amat besar bagi pemerintah kita. Selain itu, permasalahan ego sektoral juga mempersulit terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang maksimal. Prof Emil Salim memberikan contoh bagaimana ego sektoral pada tingkat global juga membawa implikasi pada tingkat nasional. Contohnya Kementerian Keuangan serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional yang sering terlibat dalam pertemuan dengan Bank Dunia sulit berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) sehubungan keterlibatan BI dalam pertemuan Dana Moneter Internasional (IMF).

Pada level pemerintahan daerah kita dapat melihat bagaimana kebijakan transportasi terintegrasi di Jakarta yang sangat dibutuhkan oleh masyarakatnya tidak dapat terwujud pada era dua periode lima tahun Gubernur Sutiyoso dan menjelang berakhirnya lima tahun periode gubernur saat ini yaitu Fauzi Bowo. Masalah utamanya adalah sulitnya koordinasi serta ego sektoral antara Pemerintah Daerah DKI, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, serta beberapa unit kerja pemerintah lainnya.

Jika mengacu pada statistik indikator makroekonomi dari Bank Dunia dalam laporan triwulanan perekonomian Indonesia pada Desember 2011,

akan ditemukan indikator yang cukup positif dari segi aspek makroekonomi. Pada 2011 pertumbuhan domestik bruto (PDB) kita sebesar 6,1% dengan tingkat inflasi mendekati 4%, serta tingkat kurs mata uang cenderung stabil di kisaran sekitar Rp9.000 per USD. Namun, walaupun terjadi tren penurunan, laporan Bank Dunia tersebut juga menginformasikan bahwa tingkat kemiskinan masih di atas 10% serta tingkat pengangguran masih lebih dari 6% angkatan kerja.

Guna merespons kondisi perekonomian tersebut, dalam tataran konsep pemerintah saat ini sadar akan pentingnya perwujudan dari visi pembangunan berkelanjutan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menekankan bahwa pemerintah saat ini menerapkan kebijakan pembangunan tiga arah yakni *pro-growth, pro-jobs, dan pro-poor*. Selain itu dalam menciptakan lapangan pekerjaan, formulasi kebijakan dan strateginya harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan hidup (*pro-environment*).

Dalam menindaklanjuti kebijakan pembangunan ekonomi tiga arah ini, pemerintah telah mengambil langkah penting dengan mengeluarkan kebijakan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Pemerintah juga sedang menggodok Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) dan nanti diharapkan pula ada Masterplan Percepatan dan Perluasan Pemeliharaan Lingkungan.

Namun, yang lebih krusial adalah eksekusi berbagai *masterplan* ini dengan menggerakkan birokrasi secara efektif dan bersih dari korupsi, juga mengajak berbagai macam pemangku kepentingan dan membebaskan unit-unit kerja pemerintah dari ego sektoral untuk dapat bekerja sama sebagai satu tim. ●

Sudah menjadi rahasia umum bahwa koordinasi pada unit-unit kerja pemerintah merupakan tantangan besar. Selain itu, permasalahan ego sektoral juga mempersulit terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang maksimal.

Hubungan Mesra Jejaring Sosial dengan Jurnalisme



JUNI SOEHARDJO

Pengamat Regulasi Media Digital

Setiap hari dalam 24 jam pengguna jejaring sosial melakukan interaksi dengan pemberitaan media massa. Interaksi bisa dilakukan dengan memberikan komentar, kritik, dukungan, bahkan memberikan sudut pandang baru. Tidak sedikit jurnalis dan media yang memanfaatkan *input* untuk pengembangan berita. Ini fenomena global, tidak terkecuali di Indonesia.

Pekan lalu Dewan Pers menggelar diskusi dengan tajuk *Penggunaan Konten Media Sosial oleh Jurnalis*. Di antara hasil yang menarik, sebanyak 32% jurnalis responden menggunakan akun jejaring sosial untuk menulis informasi personal, 40% untuk menulis informasi mengenai berita menarik di media masing-masing, 41% tentang kegiatan kerja yang tengah dilakukan. Selain itu, sebanyak 58% responden memanfaatkan *Facebook* sebagai sumber berita, sedangkan 46% memanfaatkan konten percakapan di *Twitter* dalam peliputannya.

Kemesraan antara jejaring sosial dan jurnalisme di Indonesia memiliki beberapa faktor kuat yang mendukung hubungan tersebut. Pertama, Indonesia adalah negara pengguna jejaring sosial dengan peringkat yang tinggi di dunia—baik melalui *Twitter* maupun *Facebook* maupun *brand* jejaring sosial lainnya. Data dari *www.socialbakers.com* menunjukkan pada Januari 2012 ini, pemilik akun *Facebook* di Indonesia sebanyak 43,1 juta, di atas Brasil, tetapi di bawah India yang secara mengejutkan melampaui Indonesia.

Kedua, larisnya penjualan *gadget* seperti *smartphone* yang memungkinkan orang Indonesia untuk masuk ke dalam jejaring sosial yang menunjukkan peningkatan yang luar biasa. *Smartphone* yang berada pada tingkat harga mahal seperti *Blackberry* maupun pada harga murah seperti *Nexian* terjual semakin banyak. Kondisi ini diperkuat dengan telen-desitas telekomunikasi Indonesia yang hampir mencapai 90% dari populasi di Indonesia apabila dilihat dari kartu SIM yang beredar. Kadin Indonesia memperkirakan pada 2014 penetrasi sebuah *smartphone* yang sangat terkenal akan mencapai 30% dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 252 juta orang.

Menurut Jeffrey I Cole, Direktur Centre for Digital Future, dalam lima tahun ke depan penggunaan komputer meja (desktop PC) serta laptop akan digunakan hanya sekitar 4-6% dari keseluruhan pengguna komputer. Hal ini karena tablet merupakan suatu alat yang lebih nyaman dan mudah dibawa daripada komputer meja dan laptop. Dia memperkirakan bahwa tablet sebagai alat penggunaan komputer akan menjadi pilihan utama sejak pertengahan dasawarsa 2010-an ini. Mengapa topik ini penting untuk diperhitungkan dalam perhitungan jurnalistik masa depan, alasannya adalah tak lain karena dominasi tablet akan menciptakan perubahan besar-besaran dalam bagaimana, kapan, dan mengapa orang (Amerika Serikat) masuk ke internet. Walaupun dia menggunakan Amerika Serikat sebagai contoh, pola yang sama juga berlaku di Asia dan Eropa.

Masih menurut perhitungan Kadin Indonesia, penjualan komputer di Indonesia hingga 2015 diperkirakan akan mencapai 43,9 juta yang berarti penetrasi nasional komputer

akan mencapai 18,3%. Angka tersebut baru merupakan perkiraan penjualan komputer, belum *gadget* lainnya. Dengan menggunakan perhitungan Cole, secara sederhana dapat dibayangkan kemungkinan meledaknya penggunaan tablet dan *smartphone* di Indonesia dalam tiga tahun ke depan. Mengingat Indonesia sudah mencanangkan *masterplan* percepatan perluasan pembangunan ekonomi, penyediaan infrastruktur telekomunikasi yang merupakan platform internet di mana *gadget* ini beroperasi akan segera dibangun dalam waktu dekat ke daerah-daerah terpencil dan merambah ke Indonesia sebelah timur.

Pada saat yang sama, Cole juga memperhitungkan bahwa dalam lima tahun media massa dalam bentuk cetak akan mengalami penyusutan besar-besaran. Yang bertahar dari penyusutan besar-besaran ini adalah media massa cetak yang saat ini memiliki sirkulasi terbesar atau terbit mingguan.

Kaum jurnalis memahami kondisi genting tersebut dan segera mencari jalan keluar antara lain dengan menjangkau komunitas yang mereka layani. Dahulu persebaran berita berpola satu arah yakni dari jurnalis kepada masyarakat dalam bentuk tercetak maupun elektronik. Namun, dengan berkembangnya teknologi yang memungkinkan warga biasa melaporkan apa yang terjadi di sekitarnya atau setidaknya meneruskan berita yang didaptnya dari orang lain dengan *shared-link* dan video, pola persebaran berita berubah menjadi interaktif atau dua arah. Jurnalis mengendus kesempatan ini dan sekarang mencari serta menerima *feedback* dari komunitas yang menggunakan je-

jarang sosial dan mempelajari apa yang menjadi kecenderungan masyarakat melalui jejaring sosial sehingga berita yangia turunkan menjadi lebih *update* dan relevan dengan komunitasnya.

Dalam kapasitas pelaporan suatu peliputan bersifat *real-time*, jejaring sosial mempermudah gerakan protes seperti *Occupy Wall Street* ataupun *Arab Spring* sehingga menjamin setiap perkembangan dari protes ini tetap dapat diliput. Pada waktu polisi atau aparat keamanan memblokir akses dan menahan para jurnalis profesional, para permes bersama-sama dengan para mahasiswa mengawal gerakan ini melalui sosial. Di sini terlihat kecenderungan masa depan di mana jurnalisme atau pers akan lebih terdesentralisasi, bersifat *real-time*, berkarakteristik kerja sama, serta di bawah pengampunan (*curate*) warga.

Hubungan mesra antara jejaring sosial dan jurnalisme ini juga menimbulkan pertanyaan baru: di manakah posisi jurnalis sebagai penyedia informasi di dalam masyarakat yang sudah pandai menggunakan *gadget* dan karenanya melekat informasi ini? Bagaimana dengan penerapan prinsip jurnalistik yang bersifat imparisial, tepat, dan akurat dalam menggunakan jejaring sosial sebagai sumber informasi? Bagaimana cara baru persebaran konten ini akan memengaruhi kualitas dan kedalaman dari kualitas jurnalisme? Apakah jejaring sosial dapat dikategorikan sebagai perusahaan media massa?

Semoga kemesraan antara jurnalisme dan jejaring sosial ini dikawal oleh para pemangku kepentingan sehingga memberikan nilai tambah bagi dunia. ●



Pemimpin Umum: Hary Tanoesoedibjo

Wakil Pemimpin Umum/Pemimpin Perusahaan: Syafril Nasution

Wakil Pemimpin Perusahaan: Henry Suparman, Priscilla Diana Airlin

Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: Sururi Alfardus

Wakil Pemimpin Redaksi: Nevy AN Hetharia, Pung Purwanto Redaktur Pelaksana: Djaka Susila, Wakil Redaktur Pelaksana: Alex Aji Saputra, Dwi Sasonko, Masirom Redaktur: Achmad Faisal Nasution, Abdul Hakim, Alviana Harmayanti Masrifah, Army Dian Kurmiawan, Azhar Aziz, Boy Iskandar, Danang Arradiani, Hatim Warabi, Mohammad Ridwan, Mohammad Faizal, Nurholis, Shalahuiddin, Sujoni, Supriyadi, Syahrin Rasyid, Widiansyah, Yuri Hardjanti, Yuni Adnyansah, Zen Teguh Trivibowo Asisten Redaktur: Abdul Harris, Abdul Rochim, Adam Prawira, Ahmad Baidowi, Agus Warsudi, Agung Nugroho BS, Ainun Najib, Andri Dwi Ananto, Anton Christyabito, Chamad Hojin, Donatus Nador, Edi Purwanto, Edi Yulianto, Estu Santoso, Fakhur Haqiqi, Hanna Farhana, Harley Ikhlan, Hatta Sujatmin, Helmi Firdaus, Hermanto, Herita Endriana, Hendri Irawan, Kastolani, Ma'ruf, Maria Christina Malau, Muhammad Yamin, Muhibudin Kamali, M Iqbal, Nur Iwan Tri Hendrawan, Pajjo, Pangeran Ahmad Nurdin, Pughu Hariyanto, Rakhat Baihaqi, Rusman Hidayat Siregar, Sali Pawiatan, Sazili Mustofa, Slamet Parsono, Sudarsono, Sugeng Wahyudi, Suryana Mohammad Said, Sunu Hastoro Fahrurrozi, Suwandi Achmad, Tedy Achmad, Thomas Pulungan, Titi Sutinah Abridawaty, Vitrianda Hilba Siregar, Wasis Wibowo, Wahyu Sahala Tua, Wahyono, Yanto Kusdiantono, Yogi Pasha

Reporter: Bernadette Lilia Nova, Denny Irawan, Fefy Dwi Haryanto, Haryudi, Hendrati Hapsari, Helmi Syarif, Hermansah, Inda Susanti, Islahuddin, Juni Triyanto, Kholid Rokhman, Krisandi Sacawisastra, M Purwadi, Maasaroh, Meigia, Ni Latief, Muhammad Sahlan, Neneng Zubaidah, Novia Sang Ayu Lesthia K, Nurul Huda, Rudi Saputra, Rahmat Sahid, Ratnasari Syarif, Rendra Hanggara, Roni Pasiahi, Sri Noviani, Susi Susanti, Sofian Dwi, Sucipto, Teguh Mahardika, Wahab Firmansyah, Wahyu Argianto, Wisnoe Moerti

Manager Litbang: Wiendy Hapsari

Redaktur Bahasa: Jaelani Ali Muhammad

Koordinator Fotografer: Aziz Indra

Fotografer: Arie Yudhistira, Astra Bonardo, Eko Purwanto, Hashiloh Siahaan, Ratman Suratman, Yulianto, Yudhistiro Pranoto

Manager Artistik: Wisnu Handoko

Direktur Sirkulasi & Distribusi: Sugeng H. Santoso

GM Sales: Lia Marlina, Kiki Subarkah

GM Marketing & Communications: Caecilia Hamzah

GM Sirkulasi & Distribusi: Donny Irawan

Rate iklan 2011 untuk edisi hari Sabtu-Kamis: Display FC: Rp107.000/mmk, Display BW: Rp70.800/mmk, Display Spot Colour: Rp82.400/mmk, Halaman 1: Rp176.900/mmk, Halaman 3: Rp112.500/mmk, Halaman 5: Rp112.500/mmk, Halaman 7: Rp110.200/mmk, Halaman Cover Lifestyle, Sport, Referensia, Ekonomi dan Bisnis: Rp127.300/mmk FC, Creative Ad/Island Ad: Rp42.100/mmk FC, Center spread: Rp116.100/mmk FC, Laporan Keuangan/Prospektus/Neaca FC: Rp43.000/mmk, BW: Rp39.700/mmk, Sosial/Duka Cita FC: Rp92.700/mmk, BW: Rp39.700, ..

Rate iklan 2011 untuk edisi hari Jumat: Display FC: Rp117.000/mmk, Display BW: Rp78.000/mmk, Display Spot Colour: Rp91.000/mmk, Halaman 1: Rp195.000/mmk, Halaman 3: Rp124.000/mmk, Halaman 5: Rp124.000/mmk, Halaman 7: Rp124.000/mmk, Halaman Cover Lifestyle, Sport, Referensia, Ekonomi dan Bisnis: Rp140.000/mmk FC, Creative Ad/Island Ad: Rp42.100/mmk FC, Center spread: Rp128.000/mmk FC, Laporan Keuangan/Prospektus/Neaca FC: Rp47.000/mmk, BW: Rp44.000/mmk, Sosial/Duka Cita FC: Rp102.000/mmk, BW: Rp44.000, Iklan Kolom BW: Rp46.500/mmk, Baris: Rp51.500/mmk

Layanan Langganan: (021) 3911518, Fax: (021) 3927578

Iklan Display: (021) 3915634, Fax: (021) 3927721

Iklan Baris/Kolom, Divisi Sirkulasi dan Distribusi: MNC Tower Lt.9, Jl. Kebon Sirih Raya No. 17-19

Jakarta Pusat: Telepon/Fax: (021) 3914572

E-mail: redaksi@seputar-indonesia.com, c@seputar-indonesia.com

iklankolom@seputar-indonesia.com; iklanbaris@seputar-indonesia.com

Penerbit: PT Media Nusantara Informasi, Percetakan: PT Media Nusantara Press

Bank: BCA Cabang Wahid Hasyim A/C 478-301152-5,

Anggota SPS Nomor 404/2005/11/2011, Terbit Tujuh Kali Seminggu.

Alamat: MNC Tower Lt. 22, Jalan Kebon Sirih Raya No. 17-19, Jakarta 10340.

Telepon (Hunting): (021) 3926955, Fax: (021) 3927578,

Redaksi: (021) 3926955, Fax: (021) 3927721

Wartawan Seputar Indonesia selalu dibekali tanda pengenal dan dilarang meminta / menerima apa pun dari narasumber

Hubungan mesra antara jejaring sosial dan jurnalisme ini juga menimbulkan pertanyaan baru: di manakah posisi jurnalis sebagai penyedia informasi di dalam masyarakat yang sudah pandai menggunakan gadget dan karenanya melekat informasi ini?